

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JASA
LAUNDRY KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(PENELITIAN DI KOTA GORONTALO)**

SKRIPSI

OLEH

Osinta Samadi

NIM : 271 414 124

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Di uji

Pembimbing I



Weny A. Dunga, SH., MH
NIP: 19680522 2001121 001

Pembimbing II



Dolot Alhasni Bakung, SH, MH
NIP: 19850827 200912 1 005

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JASA
LAUNDRY KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(PENELITIAN DI KOTA GORONTALO)**

SKRIPSI

OLEH

OSINTA SAMADI

NIM : 271 414 124

Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Hari/ Tanggal : Rabu, 25 Juli 2018

Pukul : 12.00 WITA

Komisi Penguji :

1. **MUTIA CHERAWATY THALIB SH, M.Hum**
NIP : 19690704 199802 2 001 (.....)
2. **ISMAIL H. TOMU SH.,MH**
NIP: 19770617 200912 1 003 (.....)
3. **WENY A. DUNGA, SH., MH**
NIP: 19680522 200112 1 001 (.....)
4. **DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH, MH**
NIP: 19850827 200912 1 005 (.....)

Gorontalo, 26 Juli 2018

**MENGETAHUI,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

MOHAMAD RUSDIYANTO U. PULUHULAWA SH, M.HUM
NIP : 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

OSINTA SAMADI, NIM : 271 414 124, “ PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JASA LAUNDRY KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (PENELITIAN DI KOTA GORONTALO) “ , PEMBIMBING I, WENY A. DUNGGA, SH., MH, , PEMBIMBING II DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH, MH, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jasa laundry kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jasa laundry kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative empiris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jasa laundry kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni belum berjalan secara efektif dan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dengan ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha jasa laundry dimana mereka berjanji untuk mengembalikan barang yang hilang atau barang yang rusak, padahal konsumen harus menunggu lama agar barang tersebut dapat kembali kepadanya dan kadangkala justru barang tersebut tidak ada kejelasan apakah akan kembali ketangan konsumen atau tidak. Oleh karena itu, apabila barang konsumen tersebut mengalami kerusakan atau hilang, maka pemilik laundry tersebut dengan itikad baik harus membayar kerugian yang dialami konsumen sekalipun konsumen tidak lagi menuntut barangnya untuk dikembalikan lagi, namun tetap saja jika didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi terhadap barang atau jasa yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jasa laundry kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni tidak adanya itikad baik dari pihak laundry, pengetahuan, faktor lingkungan, sarana dan prasarana, kesadaran hukum pengguna jasa laundry, minimnya informasi.

Kata Kunci : Itikad Baik, Laundry

ABSTRACT

SAMADI, OSINTA. STUDENT ID:271 414 124, "THE IMPLEMENTATION OF A GOOD INTENTION PRINCIPLE IN THE AGREEMENT OF LAUNDRY SERVICES IN REGARDS TO LAW NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION (A STUDY CONDUCTED IN GORONTALO CITY)". PRINCIPAL SUPERVISOR: WENY A. DUNGGA, SH, MH. CO-SUPERVISOR: DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH, MH. FACULTY OF LAW, UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

This empirical normative research aims to investigate and analyze the implementation of a good intention principle in the agreement of laundry services in regards to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection as well as the inhibiting factors in implementing a good intention principle in the agreement of laundry services as in accordance with the aforementioned law.

The result reveals that a good intention principle in the agreement of laundry services in regards to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection has not been implemented effectively. It is based on the consumers' dissatisfaction towards the services given by the laundry business in which the consumers already wait for a long time for the parties who promise to return their lost or damaged clothes, yet it seems unclear. As a result, if their clothes are lost or damaged, the owner of the laundry with a good intention should pay the loss, although the consumers do not ask for it. It is based on Law on Consumer Protection that they have a right to have compensation towards the unexpected goods or services. Furthermore, the factors obstructing the implementation of a good intention principle in the agreement of laundry services in regards to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection are as follows: no good intention from the laundry parties, knowledge, environment, facilities and infrastructure, legal awareness of laundry consumers, and minimum information.

Keywords: *Good Intention, Laundry*

